

**FUNGSI DAN TUJUAN PELAKSANAAN MASA RESES BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN DELI SERDANG
(Studi Pada Praksi Partai Amanat Nasional)**

SKRIPSI

OLEH

ERWIN LUBIS

NPM : 10 851 0030



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : FUNGSI DAN TUJUAN PELAKSANAAN
MASA RESES BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN DELI SERDANG (Studi pada
Fraksi Partai Amanat Nasional)

Nama Mahasiswa : ERWIN LUBIS

NPM : 10.851.0030

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ABDUL KADIR, M.Si

ANGGRENI ATMEI LUBIS, SH.M.HUM.

DEKAN

Dr. ABDUL KADIR, M.Si.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,

Mei 2014



Erwin Lubis
10.851.0030

ABSTRAK

Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang lembaga legislatif dan fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melihat bagaimana anggota dewan tersebut melakukan masa resesnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Penulis menggunakan metode diskriptif dimana penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian termasuk menggunakan populasi dan sampel serta pengumpulan data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dapat mengetahui tentang aspirasi yang berkembang dari masyarakat, sebab apabila aspirasi masyarakat tersebut tidak diketahui oleh anggota Dewan, maka akan berpotensi menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan dengan kehendak masyarakat.

Kata Kunci : Tujuan , Reses, DPRD Kabupaten deli Serdang

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Masa Reses Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang (Studi Fraksi Partai Amanat Nasional)"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis

Erwin Lubis
NPM : 10 851 0130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang cukup luas, dengan beraneka ragam budaya, adat, kebiasaan dan kerabat yang berbeda. Di samping itu rakyat Indonesia juga mempunyai beberapa tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, sehingga apabila membuat suatu peraturan maka para pembuat undang-undang dan peraturan lainnya, sebaiknya mengadakan penelitian terlebih dahulu tentang masyarakat tersebut, agar keputusan tersebut dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang merupakan wadah dari setiap unsur masyarakat yang ada, sebab mereka pada dasarnya dipilih langsung oleh rakyatnya, terkecuali bagi anggota TNI/Polri yang diangkat dari kesatuannya masing-masing.

Dalam kegiatannya sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang selalu mengambil kebijaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, untuk itu maka setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat menyerap setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat melihat serta melakukan perbandingan di daerah lain dapat diterapkan di DPRD Kabupaten Deli Serdang, dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Tahun 2005.
- Erickson, B.H. dan Nosamchuk, TA. *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Handjon, Philipus M. et al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Hatta, Mohammad, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2000.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Ndraha, Talizuddin, *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 2007.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remadja Karya, Bandung, 2005.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Suhardi, R.A. *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Suryaningrat, Bayu, *Organisasi Pemerintahan Wilayah Daerah*, Akasara Baru, Jakarta, 2005.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.